

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Januari-Maret 2026

Berdasarkan data perkembangan harga komoditas pada aplikasi Laminetam Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu selama Januari sampai dengan Maret 2026 cenderung berada pada level tinggi dan relatif stagnan.

Pada Januari 2026, harga beberapa komoditas strategis tercatat masih tinggi, antara lain:

- cabai rawit merah sebesar Rp90.000/kg,
- bawang merah Rp62.500/kg,
- bawang putih Rp55.000/kg,
- daging ayam ras Rp60.000/kg,
- serta LPG 3 kg sebesar Rp56.250/tabung.

Sementara itu, memasuki Maret 2026, harga komoditas utama di Mahakam Ulu relatif tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur yang cenderung mengalami fluktuasi harga pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idulfitri. Harga cabai rawit merah tetap berada pada kisaran Rp80.000/kg, bawang merah Rp65.000/kg, dan bawang putih Rp52.500/kg.

Data tersebut menunjukkan bahwa pola harga di Mahakam Ulu cenderung stabil namun berada pada level yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Sebagai contoh, pada minggu keempat Maret 2026:

- harga beras medium Mahakam Ulu sebesar Rp18.500/kg, lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi sebesar Rp15.168/kg;
- daging ayam ras sebesar Rp60.000/kg dibanding rata-rata provinsi Rp41.405/kg;
- bawang merah sebesar Rp65.000/kg dibanding rata-rata provinsi Rp46.518/kg.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu bukan hanya fluktuasi harga, tetapi juga tingginya struktur harga akibat:

1. ketergantungan pasokan dari luar daerah;
2. tingginya biaya distribusi dan logistik;
3. keterbatasan akses transportasi;
4. serta belum optimalnya produksi pangan lokal.

Secara substansi, narasi ini lebih kuat daripada hanya mengatakan “harga stabil”, karena:

- ada pembacaan tren,
- ada perbandingan dengan provinsi,
- ada interpretasi struktural,
- dan lebih defensibel kalau dipresentasikan di forum TPID/provinsi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan utama pengendalian inflasi di Kabupaten Mahakam Ulu pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. Tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, khususnya untuk komoditas pangan strategis seperti beras, minyak goreng, gula, bawang merah, bawang putih, dan protein hewani;
 2. Tingginya biaya logistik dan distribusi akibat kondisi geografis wilayah, keterbatasan akses darat, dan ketergantungan terhadap transportasi sungai;
 3. Risiko gangguan distribusi akibat faktor cuaca dan keterbatasan suplai BBM pada jalur distribusi Samarinda-Kutai Barat-Mahakam Ulu;
 4. Skala pasar yang relatif kecil dan tersebar sehingga harga barang cenderung tinggi dan tidak responsif terhadap penurunan harga regional;
 5. Produksi pangan lokal yang belum mampu menjadi penyangga utama kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan;
 6. Belum optimalnya sistem cadangan pangan dan fasilitas logistik di wilayah hulu dan perbatasan;
 7. Intervensi pengendalian harga masih bersifat jangka pendek melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM), sehingga dampaknya terhadap harga pasar belum bersifat struktural.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan beberapa langkah pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Koordinasi TPID

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan Rapat Koordinasi TPID pada tanggal 13 Februari 2026 dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang HBKN Idulfitri Tahun 2026.

Rapat koordinasi membahas:

- perkembangan harga kebutuhan pokok,
- kondisi distribusi pangan,
- kesiapan intervensi pasar,
- serta langkah pengendalian inflasi pada wilayah hulu dan perbatasan.

Selain itu, dalam forum koordinasi juga dibahas tantangan struktural pengendalian inflasi daerah, seperti:

- tingginya biaya distribusi,
- ketergantungan pasokan luar daerah,
- keterbatasan produksi lokal,
- dan risiko distribusi akibat kondisi geografis wilayah.

2. Pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM)

Sebagai langkah stabilisasi harga dan menjaga keterjangkauan masyarakat menjelang HBKN,

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melaksanakan kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM) di wilayah hulu dan perbatasan.

a. OPM Kecamatan Long Apari

Pelaksanaan OPM dilaksanakan di Kampung Tiong Bu'u Kecamatan Long Apari pada tanggal 18-19 Februari 2026.

Komoditas yang disediakan meliputi:

- minyak goreng 1.200 liter,
- gula 2.400 kg,
- bawang merah 200 kg,
- bawang putih 200 kg.

Pelaksanaan kegiatan bertujuan menjaga keterjangkauan harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok pada wilayah dengan akses distribusi terbatas.

b. OPM Kecamatan Long Pahangai

Pelaksanaan OPM juga dilaksanakan di Kampung Long Pakaq Baru Kecamatan Long Pahangai pada tanggal 07-08 Maret 2026.

Komoditas yang disediakan meliputi:

- beras premium 2.500 kg,
- minyak goreng 504 liter,
- gula 500 kg,
- bawang merah 500 kg,
- bawang putih 500 kg.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Bagian Perekonomian dan SDA.

3. Penguatan Kerja Sama dan Distribusi Pangan

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga melaksanakan penguatan koordinasi distribusi pangan dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk:

- distributor,
- pelaku usaha,
- dan Perum BULOG dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu telah melaksanakan kerja sama dengan Perum BULOG terkait pembangunan infrastruktur pasca panen dan pergudangan pangan sebagai bagian dari penguatan sistem logistik pangan daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Capaian

1. Pelaksanaan koordinasi TPID berjalan efektif dalam mendukung langkah pengendalian inflasi daerah;
2. Pelaksanaan OPM di wilayah hulu dan perbatasan membantu menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan bahan pokok masyarakat menjelang HBKN;
3. Monitoring harga dan distribusi pangan dilakukan secara berkala sebagai bagian dari early warning pengendalian inflasi;
4. Penguatan koordinasi distribusi pangan membantu menjaga kelancaran pasokan pada beberapa wilayah prioritas.

2. Kendala

Beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian inflasi antara lain:

- akses transportasi sungai dan kondisi cuaca yang mempengaruhi distribusi barang;
- keterbatasan volume komoditas dibandingkan kebutuhan masyarakat;
- ketergantungan pasokan dari luar wilayah;
- serta keterbatasan fasilitas logistik dan penyimpanan pangan di wilayah hulu.

Selain itu, intervensi pasar masih bersifat jangka pendek dan belum mampu menurunkan harga pasar secara struktural.

3. Penilaian Evaluatif

Secara umum, kebijakan pengendalian inflasi Triwulan I Tahun 2026 cukup efektif dalam menjaga keterjangkauan harga dan mengurangi risiko gejolak harga menjelang HBKN.

Namun demikian, pengendalian inflasi daerah masih menghadapi tantangan struktural berupa:

- tingginya biaya distribusi,
- keterbatasan konektivitas wilayah,
- ketergantungan pasokan luar daerah,
- dan belum optimalnya ketahanan pangan lokal.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan jangka menengah dan panjang yang berfokus pada penguatan logistik pangan, distribusi, dan produksi lokal.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan I Tahun 2026, rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Mahakam Ulu antara lain:

1. Percepatan pembangunan dan penguatan fasilitas logistik pangan serta gudang penyimpanan di wilayah hulu dan perbatasan;
2. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) guna menjaga stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga;
3. Optimalisasi pelaksanaan OPM dan Gerakan Pangan Murah (GPM) berbasis wilayah

prioritas dan kebutuhan riil masyarakat per kampung;

4. Penguatan subsidi dan dukungan distribusi pangan pada wilayah dengan biaya logistik tinggi;
5. Penguatan kerja sama distribusi lintas kabupaten/kota dan penguatan kemitraan dengan Perum BULOG dalam mendukung stabilisasi pasokan pangan daerah;
6. Penguatan produksi lokal hortikultura dan protein hewani sebagai upaya pengurangan ketergantungan pasokan luar daerah;
7. Penguatan sistem data harga dan stok pangan berbasis monitoring berkala dan early warning system guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih responsif.